



Analisis Kebijakan Green Silk Road di Zambia: Studi Kasus Kafue Gorge Lower Project

Najla Putri Syahrani¹, Nawla Farsha Alendro², Airanaya Viag³

¹Universitas Riau, Riau, Indonesia, najla.putri0184@student.unri.ac.id

²Universitar Riau, Riau, Indonesia, nawla.farsha6658@student.unri.ac.id

³Universitas Riau, Riau, Indonesia, airanaya.viag3500@student.unri.ac.id

Corresponding Author: najla.putri0184@student.unri.ac.id¹

Abstract: This study examines the implementation of the Kafue Gorge Lower (KGL) Hydropower Project in Zambia as part of China's Green Silk Road (GSR) under the broader Belt and Road Initiative (BRI). Although China frames the project as a green investment supporting sustainable energy transition, this research investigates whether KGL truly reflects a commitment to environmental sustainability or instead reproduces neo-colonial patterns through financial, technological, and political dependency. Using a qualitative descriptive-analytical approach based on extensive literature review, the study employs Neo-colonialism theory (Nkrumah), soft power (Nye), and critiques of green colonialism as analytical frameworks. The findings indicate that despite KGL's contribution to increasing Zambia's electricity capacity and strengthening national energy infrastructure, the project's financing structure—dominated by loans from the China Exim Bank—combined with limited contractual transparency and China's control over technology and contractors, creates long-term structural dependency. The green development narrative promoted through GSR functions as a political legitimacy tool that masks China's geopolitical expansion and softens accusations of debt-trap diplomacy. Consequently, the KGL project operates not only as an energy infrastructure investment but also as a strategic instrument that reinforces China's economic and political influence in Southern Africa.

Keyword: Belt and Road Initiative, China-Zambia Relations, Dept Trap Diplomacy, Green Silk Road, Neo-colonialism

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi proyek Kafue Gorge Lower (KGL) Hydropower Project di Zambia sebagai bagian dari penerapan Green Silk Road (GSR) dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) China. Meskipun diklaim sebagai investasi hijau yang mendukung transisi energi berkelanjutan, penelitian ini mengkaji apakah proyek tersebut benar-benar mencerminkan komitmen pembangunan hijau atau justru mereproduksi pola neokolonialisme melalui ketergantungan finansial, teknologis, dan politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, penelitian ini mengintegrasikan teori Neokolonialisme (Nkrumah), konsep soft power (Nye), serta kritik green colonialism sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun

proyek KGL berhasil meningkatkan kapasitas listrik Zambia dan memperkuat infrastruktur energi nasional, skema pembiayaan yang didominasi oleh pinjaman dari China Exim Bank, minimnya transparansi kontrak, serta dominasi kontraktor dan teknologi China menghasilkan ketergantungan struktural jangka panjang. Narasi pembangunan hijau dalam GSR berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik yang menutupi praktik ekspansi geopolitik China dan memperhalus pola *debt trap diplomacy* di Zambia. Dengan demikian, proyek KGL tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur energi, tetapi juga sebagai alat strategis yang memperkuat posisi ekonomi-politik China di Afrika Selatan.

Kata Kunci: Belt and Road Initiative, Dept Trap Diplomacy, Green Silk Road, Hubungan China-Zambi, Neokolonialisme

PENDAHULUAN

China adalah negara yang sangat gencar melancarkan kebijakan luar negeri melalui bantuan luar negeri. Sejak awal tahun 2010-an, China mulai memperkuat perannya sebagai kekuatan ekonomi global melalui berbagai inisiatif pembangunan internasional, sehingga perannya dalam perekonomian global semakin dominan dan berpengaruh. Melalui berbagai investasi dan kerja sama lintas negara, China berupaya untuk memperluas jangkauan ekonominya sekaligus memperkuat posisi geopolitik di berbagai kawasan dunia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendanai berbagai kegiatan ataupun proyek investasi. Pada tahun 2013 di bawah pemerintahan presiden Xi Jinping China meluncurkan kebijakan luar negeri melalui proyek One Belt, One Road (OBOR) (Anam & Ristiyani, 2018). Istilah One Belt One Road atau “satu sabuk, satu jalan” mengacu pada Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (Silk Road Economic Belt) yang membentang melalui Eurasia yang menghubungkan China dan Eropa, serta Jalan yang mengacu pada Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (21st Century Maritime Silk Road), yang di mana jalur ini menghubungkan daratan China dengan Asia Tenggara melalui kereta dan pelabuhan, lalu menghubungkan Asia Selatan hingga ke benua Afrika melalui jalur laut (Kurniawan & Denada, 2021). Pada tahun 2015, One Belt One Road (OBOR) kemudian diperhalus menjadi Belt and Road Initiative (BRI) dalam dokumen resmi China (Islam, 2019).

Akan tetapi, seiring dengan pelaksanaannya Belt and Road initiative (BRI) mulai mendapatkan banyak kritik internasional, terutama terkait dampak lingkungan dan tuduhan praktik *debt trap diplomacy*. Sehingga China membentuk Green Silk Road (GSR) sebagai respon dari kritikan tersebut, serta sebagai solusi terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan global. Secara historis, China selalu memandang Afrika sebagai tempat yang penuh peluang, alih-alih sumber masalah (Léautier et al., 2015). Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan GSR, China menjalin kemitraan dengan berbagai negara di Afrika, khususnya Zambia. Karena kekayaan sumber daya alam mineral yang besar dan penting untuk transisi energi global, sekaligus menghadapi kebutuhan besar terhadap pembiayaan infrastruktur, maka dari itu Zambia menjadi mitra strategis. Salah satu proyek dari pembangunan yang mencerminkan GSR, yaitu Kafue Gorge Lower (KGL) Hydropower Project, proyek ini dibiayai melalui pinjaman dari China Exim Bank, dan dikerjakan oleh perusahaan asal China, guna untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan transisi energi hijau di Afrika (Ofstad & Tjønneland, 2019).

Meskipun demikian, keterlibatan China dalam proyek-proyek yang berlabel “hijau” di Zambia memunculkan hal baru: apakah langkah ini benar-benar mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, atau sekadar pencitraan strategi untuk menepis tuduhan neokolonialisme dan *dept trap diplomacy*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara pembangunan hijau dalam kerangka Belt and Road Initiative, *dept trap*

diplomacy, serta ketergantungan ekonomi Zambia terhadap investasi dan pembiayaan dari China.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam peran China melalui Belt and Road Initiative (BRI), khususnya kebijakan Green Silk Road (GSR), serta implikasinya bagi Zambia dalam konteks hubungan ekonomi-politik internasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, motif, dan relasi kekuasaan yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif atau statistik (Feny et al., 2022). Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena secara rinci sekaligus menganalisis hubungan, dinamika, dan faktor penyebab yang melatarbelakangi fenomena tersebut (Tsurveyid, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, laporan penelitian, publikasi akademik, laporan kebijakan pemerintah maupun organisasi internasional, serta berita dan analisis media yang kredibel. Data sekunder ini dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan relasi internasional, praktik investasi asing, dan kebijakan negara yang membutuhkan sumber informasi yang telah diverifikasi secara akademik.

Analisis data menggunakan pendekatan teoritik dengan merujuk pada teori Neokolonialisme Kwame Nkrumah (1965). Teori ini digunakan sebagai lensa analitis untuk menilai bagaimana kontrol ekonomi dan politik dapat dilakukan tanpa pendudukan militer langsung, melainkan melalui utang, investasi asing, dan ketergantungan struktural. Dalam konteks hubungan China-Zambia, teori ini membantu menafsirkan dinamika pinjaman, investasi infrastruktur, serta potensi praktik debt trap diplomacy dalam proyek-proyek BRI.

Selain itu, konsep soft power (Nye, 1990) dan kritik mengenai "Kolonialisme Hijau" digunakan untuk membaca narasi lingkungan yang menyertai implementasi Green Silk Road. Kerangka ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana kebijakan GSR tidak hanya berfungsi sebagai inisiatif keberlanjutan, tetapi juga sebagai strategi politik dan diplomasi citra yang dapat memperkuat posisi China di Zambia. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan antarvariabel sesuai fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara China-Zambia dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) pada dasarnya berakar dari pembentukan kerja sama yang telah dibangun melalui pembentukan Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) pada tahun 2006 oleh China (HIR, 2023). FOCAC menjadi platform utama yang memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antara China dan negara-negara Afrika, khususnya Zambia. Selain melalui FOCAC, hubungan China-Zambia sebenarnya telah terjalin sebelum itu, ditandai dengan pembangunan Tanzania-Zambia Railway (TANZARA) pada tahun 1976 (Mwila, 2020), yang dibangun sebagai bentuk investasi infrastruktur untuk mengatasi hambatan geografis Zambia yang terkurung daratan, dengan menggunakan anggaran bantuan pinjaman dari China (Ofstad & Tjønneland, 2019). Hal ini yang juga menjadi faktor pendorong bergabungnya Zambia dalam BRI pada tahun 2018, kebetulan, pada tahun yang sama investasi logam mencapai puncaknya (Nedopil) (Olsson, 2022, pp. 23).

Bergabungnya Zambia dalam BRI juga menjadi peluang dalam perekonomian negara tersebut (Prabowo, 2024), hal ini dikarenakan BRI sendiri mencerminkan kerja sama pola ekonomi jangka panjang yang kuat, dan dibangun melalui investasi infrastruktur besar, seperti melalui pinjaman berskala tinggi. Investasi infrastruktur yang dilakukan oleh China di Zambia mencakup pembangunan berbagai proyek seperti jalan, rel kereta api, bandara, pembangkit listrik tenaga air, dan jaringan listrik, sering kali didanai melalui pinjaman besar dari China.

Pendanaan pinjaman Zambia dari sumber-sumber China, kreditor utamanya adalah Bank EXIM China. Pinjaman lain telah diperoleh dari Bank Pembangunan China dan Perusahaan China Aerospace Times Electronics Company (CATEC). Bank EXIM dan Bank Pembangunan menyediakan pinjaman dengan persyaratan konsesi parsial, sehingga lebih murah daripada persyaratan komersial (Ofstad & Tjønneland, 2019).

Secara keseluruhan, hubungan China-Zambia dalam BRI mencerminkan pola pembangunan jangka panjang. Melalui kombinasi dari infrastruktur dan pinjaman, BRI tidak hanya memperluas peran China sebagai aktor utama dalam pembangunan, tetapi juga dengan kerja sama yang dibuat untuk berlangsung dalam jangka waktu puluhan tahun ke depan. Ditambah lagi, kemunculan Green Silk Road dengan agenda hijau, seperti Kafue Gorge Lower (KGL) Hydropower Project, yang ikut mempererat hubungan China dan Zambia.

Selain itu, posisi Zambia dalam BRI tidak hanya dipandang sebagai peluang pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari kepentingan geopolitik China di Afrika bagian selatan. Zambia berada di kawasan strategis Southern African Development Community (SADC) yang merupakan jalur penting bagi distribusi logam kritis seperti tembaga dan kobalt—dua komoditas utama bagi industri teknologi dan energi global (Hanson, 2023). China merupakan importir terbesar tembaga Zambia, sehingga keterlibatan dalam proyek-proyek energi dan infrastruktur berfungsi memperkuat kehadiran jangka panjang China pada rantai pasok mineral strategis (Rosen & Hanemann, 2022). Secara geopolitik, langkah ini sekaligus memperluas pengaruh China di Afrika Sub-Sahara, terutama di tengah kompetisi antara kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang juga berusaha mengamankan akses terhadap mineral transisi energi (IEA, 2023).

Zambia menjadi salah satu titik penting dalam strategi China untuk mengamankan jalur pasokan dan memperkuat posisi di kawasan selatan Afrika yang secara regional memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, hubungan China-Zambia di bawah BRI mengandung dimensi geoeconomik dan geopolitik yang saling bertautan, tidak semata-mata pembangunan infrastruktur, tetapi juga strategi memperluas sphere of influence China di kawasan tersebut.

Konsep Green Silk Road (GSR) muncul sebagai upaya China mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam Belt and Road Initiative (BRI), terutama melalui dukungan terhadap energi bersih, infrastruktur rendah karbon, dan pembiayaan ramah lingkungan (Cao, et al., 2023). Zambia merupakan salah satu negara Afrika Sub-Sahara yang paling sering dijadikan studi kasus karena posisinya yang strategis dalam jaringan BRI di Afrika bagian selatan, kebutuhan energinya yang meningkat, serta ketergantungannya pada industri pertambangan yang membutuhkan pasokan listrik stabil. Dalam konteks tersebut, implementasi GSR di Zambia banyak berpusat pada pembiayaan dan pembangunan pembangkit energi terbarukan berskala besar, proyek infrastruktur energi, serta jaringan transmisi yang menghubungkan kawasan industri dengan pusat-pusat produksi listrik.

Salah satu contoh proyek BRI di Zambia melalui konsep GSR adalah Kafue Gorge Lower (KGL) Hydropower Project yang merupakan sebuah PLTA berkapasitas sekitar 750 MW dan nilai pembiayaan sekitar US\$1,53 miliar yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi China, Sinohydro. Kontraktor utama proyek Sinohydro, perusahaan milik negara China bertanggung jawab atas pembangunan seluruh infrastruktur pembangkit. Proyek ini menjadi ikon utama kerja sama energi hijau antara Zambia dan China. KGL hydropower project yang memperkuat pasokan listrik nasional merupakan salah satu bentuk investasi infrastruktur terbesar pasca-kemerdekaan, yang dibiayai melalui pinjaman berskala tinggi terhadap China. Pembangunan KGL ini bukan semata-mata hanya memenuhi energi domestik, tetapi juga mencerminkan orientasi BRI pada pembangunan jangka panjang yang mampu menopang sektor industri dan pertambangan Zambia.

KGL menjadi contoh utama bagaimana GSR diterjemahkan ke dalam kebijakan energi nasional (Brautigam, 2021). Seperti yang dibahas oleh Brautigam (2019), pola pembiayaan semacam ini umumnya menggunakan skema concessional loans and buyer's credit yang disediakan melalui lembaga keuangan kebijakan seperti China Exim Bank yang menyediakan sekitar US\$ 881,9 juta dan ICBC sebagai lembaga pendukung, di mana sebagian besar dana pinjaman secara otomatis terkait pada penggunaan kontraktor, bahan baku, dan teknologi dari China. Skema tersebut mempercepat realisasi pembangunan, tetapi sekaligus memperkuat ketergantungan struktural negara penerima terhadap penyedia modal dan teknologi.

Keberadaan teknis inti dan dua entitas keuangan dari China menegaskan bahwa sejak awal proyek ini diposisikan sebagai bagian dari platform Belt and Road Initiative (BRI) yang dikemas sebagai kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Afrika (AidData, n.d.). Di dalam wacana internasional, China secara aktif mempromosikan KGL sebagai bukti keseriusannya dalam mendorong transisi energi bersih global. Narasi resmi yang dibangun oleh pemerintah China menggambarkan proyek ini sebagai langkah maju dalam penyediaan energi rendah karbon dan peningkatan ketahanan energi Zambia. Media China maupun media Zambia secara rutin menonjolkan manfaat lingkungan yang dihasilkan dari proyek ini, termasuk peningkatan kapasitas listrik nasional yang lebih stabil dan pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batu bara. Dengan cara ini, China berhasil membungkai keterlibatannya sebagai bentuk bantuan pembangunan yang modern, progresif, dan ramah lingkungan, sekaligus menanamkan citra bahwa negara tersebut merupakan pemimpin global dalam pembangunan hijau.

Namun, fungsi Green Silk Road tidaklah berhenti pada aspek teknis dan lingkungan semata. Narasi “pembangunan hijau” juga menjadi alat diplomasi pencitraan strategis yang sangat penting bagi China, terutama di tengah kritik global yang menuduh BRI sebagai instrumen debt-trap diplomacy. Dengan mendorong proyek besar yang berlabel hijau seperti KGL, China berusaha menggeser persepsi publik internasional dari isu utang dan transparansi ke arah citra positif sebagai negara yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Proyek seperti KGL memungkinkan China mengatur ulang wacana global tentang ekspansi ekonominya bukan sebagai bentuk hegemoni ekonomi, tetapi sebagai bentuk solidaritas lingkungan dan pembangunan. Narasi ini memperoleh resonansi di Afrika karena banyak negara di kawasan tersebut mengalami defisit energi kronis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, fakta bahwa pembiayaan proyek sebagian besar disokong pinjaman bersyarat menunjukkan bahwa narasi hijau tersebut memiliki dimensi politik yang lebih dalam. KGL menjadi instrumen penting bagi China dalam menampilkan diri sebagai penyedia solusi “hijau,” namun secara bersamaan memperkuat posisi negara tersebut sebagai kreditor dominan di Zambia. Beban utang yang terkait dengan proyek KGL dan proyek-proyek BRI lainnya menciptakan struktur ketergantungan yang menguntungkan China dalam jangka panjang.

Selain PLTA, keterlibatan China dalam energi terbarukan semakin terlihat melalui pembangunan proyek-proyek solar farm di Lusaka, Copperbelt, dan Chisamba yang ditujukan untuk menstabilkan pasokan listrik bagi sektor industri dan pertambangan (Hensengerth, 2021). Investasi energi surya ini menjadi penting mengingat Zambia sering mengalami kekeringan yang menurunkan kapasitas PLTA, sehingga diversifikasi energi menjadi strategi mitigasi risiko yang strategis. Namun karakteristik pendanaan proyek-proyek ini tetap mengikuti pola BRI pada umumnya, yaitu dominasi kontraktor China, proses transfer teknologi yang terbatas, serta model kontrak EPC yang dikendalikan penuh oleh perusahaan China dari tahap perencanaan hingga implementasi. Kondisi ini, sebagaimana dicatat Alves (2013), menyebabkan negara penerima sering kali hanya menjadi pengguna akhir teknologi, bukan sebagai pengembang teknologinya sehingga menciptakan ketergantungan teknis jangka panjang dan memperlambat peningkatan kapasitas domestik di sektor energi.

Green Silk Road melalui proyek KGL memberikan manfaat pembangunan yang langsung terasa bagi Zambia. Pembangunan PLTA berskala besar ini meningkatkan kapasitas listrik nasional sehingga stabilitas pasokan energi membaik, frekuensi pemadaman berkurang, dan produktivitas sektor industri, terutama pertambangan tembaga dan kobalt dapat meningkat. Keandalan energi ini juga membuka peluang perluasan elektrifikasi pedesaan serta mendukung munculnya industri baru yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan listrik. Dalam konteks pendanaan, argumen Alden dan Large (2015) relevan: pembiayaan China menutup kekosongan investasi infrastruktur yang selama bertahun-tahun tidak mampu dipenuhi lembaga keuangan Barat maupun kreditor multilateral. Pendanaan, teknologi, dan kecepatan implementasi yang ditawarkan China membuat proyek sebesar KGL dapat terealisasi jauh lebih cepat dibandingkan jika Zambia hanya bergantung pada mekanisme pembiayaan konvensional.

Tetapi dibalik kemajuan infrastruktur tersebut tantangan yang muncul justru semakin kompleks, terutama karena proyek ini dibangun dalam konteks hubungan ekonomi-politik yang sangat simetris. Zambia menghadapi tantangan ketergantungan teknis yang tidak kalah serius. Kontraktor utama KGL, Sinohydro, menggunakan standar teknologi, peralatan, dan manajemen proyek yang terintegrasi penuh dengan sistem China. Situasi ini menempatkan Zambia dalam posisi di mana keberlanjutan proyek sangat bergantung pada dukungan teknis eksternal, mulai dari suplai suku cadang hingga peningkatan kapasitas operasional.

Skema pembiayaan yang didominasi pinjaman dari China Exim Bank dan ICBC menjadikan Zambia terikat secara fiskal untuk jangka panjang. Laporan IMF terbaru mencatat bahwa Zambia telah masuk kategori *high risk of external debt distress*, karena beban utang publik yang terus meningkat menyempitkan ruang fiskal negara (IMF, 2024). Dalam kondisi seperti ini, kemampuan pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan menjadi terbatas karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan pinjaman. Tekanan fiskal tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar yang selama lebih dari satu dekade sangat mengandalkan modal eksternal.

Tekanan utang yang meningkat pada akhir 2010-an hingga awal 2020-an memperlihatkan bagaimana struktur pembiayaan luar negeri, termasuk pinjaman berorientasi proyek dari bank-bank China, dapat membebani stabilitas ekonomi negara penerima. Hal ini konsisten dengan analisis Brautigam (2021) yang menyoroti risiko likuiditas dan krisis fiskal di negara Afrika yang mengadopsi model pembiayaan infrastruktur intensif utang. Lebih jauh, ketergantungan Zambia tidak hanya bersifat finansial tetapi juga teknis dan institusional. Proyek seperti KGL membutuhkan sistem operasional, suku cadang, dan keahlian teknis yang sebagian besar berasal dari China, sementara kapasitas domestik belum berkembang memadai. Ketika kapasitas lokal rendah, biaya pemeliharaan meningkat dan ketergantungan jangka panjang pada penyedia eksternal semakin dalam, sebuah pola yang memperkuat risiko *debt trap* berbasis dependensi struktural.

Potensi penguatan ketergantungan struktural ini semakin terlihat ketika skema pembiayaan yang digunakan berisiko menempatkan Zambia dalam situasi *debt trap*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beban utang dari proyek KGL dan inisiatif BRI lainnya telah menempatkan Zambia dalam hubungan yang semakin asimetris dengan China. Kondisi ini membuat Green Silk Road tidak hanya berfungsi sebagai proyek energi hijau, tetapi juga instrumen soft power yang memperluas pengaruh geopolitik China (Nizza-Makowska et al., 2024). Situasi tersebut menjadikan isu *debt trap* semakin relevan karena menjadi faktor penting dalam menguatnya ketergantungan Zambia terhadap kreditor utamanya.

Ketika Zambia mulai memasuki periode pelunasan eurobond, pemerintah justru kembali mengambil pinjaman besar dari China untuk membiayai proyek bendungan Kafue Gorge senilai US\$1,53 miliar. Pola pinjaman berulang seperti ini memperdalam kerentanan fiskal negara dan memicu kekhawatiran eksternal, termasuk dari Amerika Serikat, terkait masa depan

aset strategis seperti ZESCO (Servant, 2019). Kekhawatiran tersebut beralasan karena China diperkirakan memegang sekitar 30% dari total utang luar negeri Zambia, dengan estimasi berkisar antara US\$3,3 hingga US\$6,6 miliar. Perbedaan angka antara laporan resmi dan temuan penelitian independen menegaskan persoalan klasik dalam pembiayaan China, yakni kurangnya transparansi dan keberadaan klausul kerahasiaan yang membatasi akses terhadap informasi pinjaman.

Tantangan tersebut diperburuk oleh minimnya transparansi kontrak pembiayaan. AidData menemukan bahwa pinjaman KGL memuat puluhan syarat yang tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga publik tidak mengetahui potensi klausul penalti, kewajiban tambahan, atau ketentuan yang dapat memengaruhi kedaulatan ekonomi Zambia. Ketertutupan ini melemahkan akuntabilitas pemerintah dan menempatkan Zambia pada posisi tawar yang rendah dalam negosiasi, terutama ketika proyek dianggap vital bagi pembangunan nasional. Akibatnya, syarat pinjaman dapat mencakup kewajiban penggunaan kontraktor tertentu atau pembelian material impor yang tidak memberikan manfaat ekonomi bagi industri lokal. Meskipun proyek tersebut menawarkan manfaat pembangunan, risiko fiskal yang dihasilkan tidak dapat diabaikan.

Praktik ini sering memicu narasi “debt trap diplomacy”, meskipun bukti empiris mengenai motif sengaja tersebut masih diperdebatkan. Akan tetapi, kasus Zambia memperlihatkan bahwa kombinasi pinjaman besar, ketergantungan fiskal, serta proses negosiasi bilateral yang terfragmentasi, berbeda dengan mekanisme terkoordinasi seperti Paris Club yang memperburuk posisi tawar negara debitur. Hal ini tampak ketika Zambia mengajukan keringanan melalui DSSI dan kemudian Common Framework, hingga akhirnya China bersedia bertindak sebagai ketua bersama komite kreditor bersama Prancis. Perjanjian restrukturisasi tahun 2023 menunjukkan bahwa China bersedia bekerja dalam kerangka multilateral bila diperlukan, meskipun tetap menjaga jarak dari institusi kreditor tradisional (Mak, 2025).

Dalam konteks ini, klaim mengenai adanya *debt trap* di Zambia mendapatkan pembernanan melalui struktur utang yang semakin membengkak, pola pinjaman baru untuk menutup utang lama, dan ketergantungan yang kian kuat pada kreditor eksternal terutama China. Namun analisis tersebut juga menunjukkan bahwa perangkap utang tidak semata-mata berasal dari strategi kreditor; faktor internal seperti tata kelola fiskal yang lemah, ketidakefisienan negara, dan ketergantungan historis juga memainkan peran penting (Toussaint & Millet, 2019, pp. 415–417). Dengan demikian, analisis *debt trap* Zambia perlu dilihat sebagai hasil interaksi antara tekanan eksternal dan kerentanan domestik, bukan sebagai fenomena yang didorong sepahak oleh China.

Dari perspektif teori neokolonialisme, keterlibatan China dalam proyek Green Silk Road di Zambia menunjukkan pola kontinuitas kolonial dalam bentuk yang lebih terselubung dan berorientasi ekonomi. Neokolonialisme, sebagaimana dijelaskan oleh Kwame Nkrumah, bukan lagi tentang pendudukan langsung, tetapi dominasi melalui instrumen ekonomi, investasi, dan ketergantungan struktural. Dalam konteks Zambia, pola ini terlihat jelas melalui cara China mengatur pembangunan infrastruktur strategis menggunakan skema pembiayaan yang menempatkan negara tuan rumah dalam posisi subordinat. Menurut laporan terbaru IMF (2024), total utang luar negeri Zambia untuk kategori public and publicly guaranteed (PPG) telah mencapai US\$21,4 miliar pada akhir Juni 2024. IMF dalam laporannya tahun 2025 juga menegaskan bahwa Zambia tetap berada pada kategori *high risk of external debt distress*, sekalipun negara tersebut sedang menjalani program pemulihan fiskal melalui Extended Credit Facility (IMF, 2024; 2025). Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa Zambia berada dalam posisi rentan secara fiskal dan sangat bergantung pada kreditor eksternal, termasuk China yang merupakan salah satu kreditor bilateral terbesar Zambia.

Dengan demikian, intervensi pembangunan China dalam proyek-proyek energi dan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari konteks beban utang Zambia yang semakin membesar. Pembiayaan proyek KGL pun memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan pola neokolonialisme ekonomi, \$1,53 miliar didanai melalui syndicated buyer's credit facility, yang utamanya berasal dari China Eximbank (Bank Ekspor-Impor Tiongkok) dan bankbank komersial Tiongkok lainnya (AidData, 2023). Pinjaman ini jatuh tempo dalam jangka waktu 15–20 tahun. Mengingat proyek ini baru beroperasi penuh pada tahun 2023 dan pinjaman tersebut disepakati beberapa tahun sebelumnya, sebagian besar pokok utang tersebut hampir pasti masih belum lunas dan menjadi bagian dari total utang bilateral Zambia kepada Tiongkok. AidData juga melaporkan bahwa perjanjian kredit untuk proyek ini terdiri dari 87 syarat pinjaman yang tidak pernah dipublikasikan, menunjukkan minimnya transparansi dan tingginya kontrol kreditor dalam menentukan isi dan arah proyek. Tidak hanya itu, karena Sinohydro kontraktor utama adalah perusahaan milik negara China, penguasaan atas aspek teknis proyek juga berada sepenuhnya di tangan pihak Tiongkok. Hal ini menciptakan ketergantungan ganda bagi Zambia: ketergantungan finansial melalui pinjaman, dan ketergantungan teknologi melalui penggunaan standar teknis dan peralatan yang sepenuhnya berasal dari China.

Dalam hubungan semacam ini, posisi tawar Zambia sangat terbatas. China bukan hanya pemberi modal, tetapi juga penentu spesifikasi teknis, arah implementasi, jadwal pembangunan, hingga mekanisme pembayaran utang. Hal ini sejalan dengan karakteristik neokolonialisme yang digambarkan Nkrumah, di mana negara besar mengendalikan negara berkembang melalui dominasi ekonomi dan kontrol kebijakan, meskipun tanpa kehadiran militer. Melalui proyek-proyek hijau seperti KGL, dominasi ekonomi ini tersamarkan oleh narasi keberlanjutan, sehingga keterikatan struktural Zambia terhadap modal dan kepentingan China tampak sebagai bentuk kerja sama pembangunan yang saling menguntungkan. Lebih jauh lagi, narasi Green Silk Road berfungsi sebagai legitimasi moral.

Namun analisis neokolonialisme justru mengungkap bahwa keberlanjutan lingkungan sering kali digunakan sebagai kedok untuk memfasilitasi pola dominasi yang lebih luas. Infrastruktur hijau diposisikan sebagai jalan masuk untuk mengunci ketergantungan jangka panjang negara penerima terhadap modal, teknologi, dan pengaruh politik negara pemberi pinjaman. Dengan demikian, meskipun Green Silk Road membawa manfaat nyata berupa peningkatan kapasitas energi dan infrastruktur, hubungan yang terbentuk tetap memperlihatkan ciri khas neokolonial: asimetri kepentingan, ketergantungan struktural, dan dominasi ekonomi terselubung yang dibungkus narasi pembangunan hijau. Proyek ini menjadi contoh konkret bagaimana agenda keberlanjutan dapat digunakan bukan hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk memperluas pengaruh geopolitik melalui mekanisme ekonomi yang bersifat hierarkis.

Melihat berbagai dinamika yang mengiringin implementasi KGL dan proyek GSR lainnya, Zambia perlu mengambil langkah strategis yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah teknis pembangunan, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam hubungan jangka panjang dengan China. Langkah pertama adalah memperluas transparansi kontrak dan proses penganggaran. Pemerintah perlu membuka dokumen perjanjian pinjaman kepada publik agar lembaga pengawas, akademisi, dan rakyat sipil dapat melakukan evaluasi independen. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan yang disepakati benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menciptakan beban jangka panjang yang tidak proporsional. Pemenuhan prinsip transparansi juga dapat membantu Zambia mendapatkan posisi tawar lebih kuat dalam renegosiasi utang, terutama karena IMF telah memberikan sinyal bahwa struktur utang Zambia memerlukan penyesuaian agar fiskal negara kembali stabil (IMF, 2024). Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat kebijakan transfer teknologi dalam memperkuat kerja sama dengan kontraktor asing.

Zambia dapat merumuskan kebijakan yang mewajibkan kontraktor untuk melibatkan tenaga ahli lokal dalam setiap tahap konstruksi, operasi, dan pemeliharaan proyek energi. Pendekatan ini penting agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas teknis nasional. Model seperti ini telah terbukti penting dalam mengurangi ketergantungan jangka panjang, sebagaimana ditunjukkan dalam studi mengenai proyek energi terbarukan di Afrika oleh Hensengerth

(Hensengerth, 2021). Selain itu, pemerintah dapat membangun pusat pelatihan teknis khusus energi terbarukan bekerja sama dengan universitas lokal untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kapasitas SDM.

Selain memperkuat aspek teknis Zambia juga perlu mendiversifikasi sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Ketergantungan pada satu kreditor utama menciptakan risiko konsentrasi utang yang sangat besar dan memperlemah kemampuan negosiasi negara. Zambia dapat mengembangkan portofolio pembiayaan yang lebih seimbang melalui kombinasi pendanaan multilateral dari lembaga seperti African Development Bank, skema blended finance, hingga kerja sama investasi regional. Diversifikasi ini penting untuk menghindari situasi di mana negara harus menerima syarat pinjaman yang tidak ideal karena minimnya alternatif pembiayaan.

Rekomendasi selanjutnya adalah memperbaiki tata kelola fiskal dan memperkuat pengelolaan sektor perkembangan, mengingat komoditas seperti tembaga dan kobalt merupakan sumber pendapatan terbesar Zambia. Peningkatan kapasitas penerimaan negara dari sektor pertambangan dapat memperluas ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan pada linjaman eksternal. Pendekatan ini juga dapat membantu Zambia membangun dana cadangan fiskal yang digunakan untuk mengelola risiko utang di masa depan, sehingga negara tidak kembali terjebak dalam siklus pengambilan pinjaman yang terus berulang. Terakhir, Zambia perlu membangun strategi diplomasi ekonomi yang lebih proaktif dalam hubungan dengan China. Negara dapat mencontoh pendekatan beberapa negara Afrika lain yang telah berhasil menegosiasikan ulang struktur utang atau memperbaiki syarat proyek melalui dialog yang lebih tegas dan berbasis data. Diplomasi yang aktif memungkinkan Zambia mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan tanpa kehilangan kedaulatan kebijakan.

KESIMPULAN

Analisis terhadap kebijakan Green Silk Road melalui proyek Kafue Gorge Lower (KGL) menunjukkan bahwa inisiatif ini bukan sekadar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga instrumen perluasan pengaruh geopolitik oleh China di Afrika. KGL memang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas energi Zambia dan mendukung transisi menuju sumber daya yang lebih bersih. Namun manfaat tersebut berjalan beriringan dengan risiko struktural yang signifikan, terutama karena proyek ini dibiayai melalui skema pinjaman besar dari China Exim Bank dan ICBC. Kondisi ini memperparah situasi fiskal Zambia yang telah ditetapkan IMF berada dalam kategori *high risk of external debt distress* dan mendorong negara tersebut semakin masuk dalam pola ketergantungan utang jangka panjang.

Minimnya transparansi kontrak, ketentuan teknis yang mengikat, serta posisi tawar pemerintah yang lemah memperkuat potensi terjadinya *debt trap diplomacy*, di mana pemberi pinjaman memperoleh leverage politik dan ekonomi melalui struktur pembiayaan yang sulit dinegosiasikan kembali. Pola hubungan semacam ini memperlhatikan kecenderungan neokolonialisme dalam bentuk baru, bukan melalui kontrol teritorial, tetapi melalui dominasi finansial, teknologi, dan institusional yang membatasi ruang kebijakan negara penerima. Kasus KGL dengan demikian menegaskan bahwa meskipun Green Silk Road membawa peluang pembangunan energi, ia juga menciptakan hubungan asimetris yang berpotensi melemahkan kedaulatan Zambia. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ke depan menuntut

transparansi kontrak yang lebih kuat, diversifikasi sumber pendanaan, serta penguatan kapasitas domestik untuk menghindari ketergantungan yang dapat menyeret negara lebih jauh ke dalam krisis utang dan subordinasi struktural.

REFERENSI

- AidData. (n.d.). Project ID 57536: China EximBank participates in \$1.53 billion syndicated buyer's credit for 750MW Kafue Gorge Lower Hydropower Plant. *AidData*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://china.aiddata.org/projects/57536/>
- Alden, C., & Large, D. (2015). New Direction in Africa-China Studies. Routledge.
- Alves, A. (2013). "China's Hydropower Investment in Africa. The Case of Zambia." *SAIIA Occasional Paper*.
- Anam, S., & Ristiyani. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2).
- Bank of Zambia. (2024). Bank of Zambia Annual Report 2024. *Bank of Zambia*. Diakses pada 17 November 2025, dari https://www.boz.zm/Bank_of_Zambia_2024_Annual_Report.pdf
- Bassey, N. (2023). Green and internal colonialism in Africa. *Global Dialogue*, 13(2). Diakses pada 17 November 2025, dari <https://globaldialogue.isa-Sociology.org/articles/green-and-internal-colonialism-in-africa>
- Brautigam, D. (2019). The Dragon's Gift. The Real Story of China in Africa. *Oxford University Press*.
- Brautigam, D. (2021). How Zambia and China co-created a debt "tragedy of the commons" (SAIS-CARI Working Paper No. 51). China Africa Research Initiative, Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies.
- Cao, X., Zhao, F., Wang, Y., Deng, Y., Zhang, H., & Huang, X. (2023). The Belt and Road Initiative and enterprise green innovation: evidence from Chinese manufacturing enterprises. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, Article 1176907. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://www.frontiersin.org/journals/ecology-andevolution/articles/10.3389/fevo.2023.1176907/full>
- Feny, R. F., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI*.
- Harvard International Review. (2023). Chinese Investment in Africa: A Reexamination of the Zambian Debt Crisis. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://hir.harvard.edu/chinese-investment-in-africa-a-reexamination-of-thezambian-debt-crisis/?hl=en-US>
- Hanson, S. (2023). China in Africa: The role of critical minerals. *Council on Foreign Relations*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://www.cfr.org/backgrounder/china-africa-and-critical-minerals>
- Hensengerth, O. (2021). "China's Renewable Energy Investments in Africa." *Energy Policy*, 156.
- International Monetary Fund. (2024). Zambia: Fourth review under the arrangement under the Extended Credit Facility and financing assurances review (Country Report No. 2024/350). *IMF*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2024/12/17/zambia-fourthreview-under-the-arrangement-under-the-extended-credit-facility-andfinancing-559680>

- International Energy Agency. (2023). The role of critical minerals in clean energy transitions. *IEA*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>
- International Monetary Fund. (2024). Zambia: Fourth review under the arrangement under the Extended Credit Facility and financing assurances review (Country Report No. 2024/350). *IMF*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://www.imf.org/en/publications/cr/Issues/2024/12/17/zambia-fourthreview-under-the-arrangement-under-the-extended-credit-facility-and-financing-559680>
- International Monetary Fund. (2025). IMF Executive Board concludes 2025 Article IV consultation and completes fifth review under the Extended Credit Facility with Zambia. *IMF*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://www.imf.org/en/news/articles/2025/08/05/pr25276-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-con-and-completes-5th-review-ecf-zambia>
- Islam, M. N. (2019). Silk Road to Belt Road: Reinventing the past and shaping the future. *Springer*.
- Kurniawan, Y., & Denada, F. L. G. (2021). Diplomasi ekonomi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara (2013–2018): Studi kasus pembangunan infrastruktur melalui BRI di Vietnam. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur*. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id>
- Léautier, F. A., Michael, S., & Wei, S. (2015). Part I: China's new Maritime Silk Road: An opportunity for the revival of Africa. *UONGOZI Institute*.
- Mak, C. H. W. (2025). Sovereign debt restructuring in Zambia: A Chinese approach. *Oxford Business Law Blog*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2025/10/sovereign-debt-restructuring-zambia-chinese-approach>
- Mwila, N. (2020). Gateway Theory of Internationalization: The Case of OBOR/BRI in Zambia. *Journal of International Business Research*, 19(1).
- Nitza-Makowska, A., Longhurst, K., & Skiert-Andrzejuk, K. (2024). Green soft power? Checking in on China as a responsible stakeholder. *Polish Political Science Yearbook*, 53(1), 17–33. <https://doi.org/10.15804/ppsy202402>
- Nkrumah, K. (1965). Neo-Colonialism: The last stage of imperialism (2nd ed.). Nelson. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://www.marxists.org/subject/africa/nkrumah/neo-colonialism/neocolonialism.pdf>
- Nye, J. S. (1990). Bound to lead: The changing nature of American power.
- Olsson, R. (2022). China's Green Transition: Analysing Chinese Minerals Policy, and its Impact on Zambia.
- Ofstad, A., & Elling, N. T. (2019). Zambia's looming debt crisis – is China to blame? CMI Insight, (1), June 2019. *Chr. Michelsen Institute (CMI)*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://www.cmi.no/publications/6866-zambias-looming-debt-crisis-china-to-blame>
- Prabowo, D. K. (2024). Implementasi Proyek Gajah Putih Tiongkok Terhadap Perekonomian di Zambia Tahun 2020-2023. *Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Rosen, D., & Hanemann, T. (2022). China's global investment in mining and strategic resources. *Rhodium Group*. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://rhg.com/research/china-global-mining-investment/>
- Servant, J. C. (2019). China steps in as Zambia runs out of loan options. *The Guardian*. Diakses pada 17 November, dari

<https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2019/dec/11/china-steps-in-as-zambia-runs-out-of-loan-options>

Toussaint, E., & Millet, D. (2019). Mafia Bank Dunia & IMF: Alat penjajahan baru negara industri terhadap negara berkembang sejak akhir Perang Dunia II (A. Jebadu, Trans.). *Penerbit Ledalero*.

Tsuderveyid. (2024). Penelitian Deskriptif: Pengertian, Metode, Jenis, dan Contohnya. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://tsurvey.id/portal/penelitiandeskriptif-pengertian-metode-jenis-dan-contohnya>